

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN PENULIS	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT.....	iv
ملخص.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Hasil Penelitian	15
E. Kerangka Pemikiran	17
1. <i>Grand Theory: Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	17
2. <i>Middle-Range Theory: Teori Sistem Hukum</i>	20
3. <i>Applied Theory: Teori Hukum Pembangunan</i>	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Hasil Penelitian Terdahulu	27
B. Transformasi Hukum Pidana	46
1. Pengertian Hukum Pidana	46
2. KUHP Lama dan KUHP Nasional	48
3. Filosofi KUHP Lama dan KUHP Nasional	52
4. Transformasi Hukum Pidana	55
5. Transformasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam	58
C. Tindak Pidana Suap	62
1. Pengertian Korupsi	62
2. Tindak Pidana Suap sebagai bagian dari Korupsi	65
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Suap	72
4. Jenis-Jenis Suap	75
5. Dampak Ekonomi Suap Sektor Swasta	78
6. Kerangka Hukum Internasional UNCAC	79

7. Suap dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam	83
D. Kerangka Normatif Hukum Ekonomi Islam	88
1. Pengertian Hukum Ekonomi Islam	88
2. Sumber Hukum Ekonomi Islam	91
3. Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Islam	95
4. <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> (Imam al-Syatibi)	100
5. Relevansi <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> terhadap Larangan Suap	103
E. Suap Sektor Swasta sebagai Kategori Delik Tersendiri	108
1. Konsep Delik Umum (Delik Komuna) dalam Doktrin Hukum Pidana	108
2. Karakteristik Suap Murni Antar-Pelaku Privat (<i>Private-to-private bribery</i>)	109
3. Kedudukan Pasal 603 KUHP Nasional dan Pasal 12B UU Tipikor	110
F. Kerangka Hukum Internasional Anti Suap Sektor Swasta	112
1. Kriminialisasi Suap Sektor Swasta dalam Pasal 21 UNCAC	112
2. Status Ratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 2006 dan Implikasinya	114
3. Instrumen Internasional Pendukung Lain	115
G. Perbandingan Hukum Pidana Suap Sektor Swasta Lima Negara	117
1. United Kingdom (UK <i>Bribery Act</i> 2010)	117
2. Singapura (<i>Prevention of Corruption Act</i> 1960)	119
3. Malaysia (MACC Act 2009, Seksyen 17A)	120
4. Jerman (German Criminal Code/StGB)	121
5. Prancis (Loi Sapin II)	122
H. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	126
1. Orientasi Pidana (Retributif, Deterensi, Rehabilitasi, <i>Restorative Justice</i>)	126
2. Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	127
3. Perkembangan Corporate Liability dalam KUHP Nasional ...	130
4. Sintesis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam	131
I. Instrumen Kebijakan Pendukung Transformasi	131
1. Compliance System dalam Tata Kelola Korporasi	131
2. Asset Recovery dalam Kerangka UNCAC	133
3. <i>Whistleblower Protection</i>	134
J. Operasionalisasi Prinsip Hukum Ekonomi Islam dalam Transformasi Hukum Pidana	135
1. Hisbah sebagai Mekanisme Pengawasan Ekonomi	135
2. Mas'uliyah sebagai Prinsip Akuntabilitas	137
3. Sintesis Lima Prinsip Hukum Ekonomi Islam sebagai	138

Instrumen Analitis	
K. Kajian Fikih Klasik tentang Risywah	140
1. Pandangan Mayoritas Ulama tentang Keharaman Risywah ...	140
2. Pengecualian bagi Pemberi Risywah untuk Memperoleh Hak atau Menolak Kezaliman	141
3. Posisi Penelitian terhadap Risywah di Sektor Swasta	142
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	145
A. Pendekatan Penelitian dan Metode Penelitian	145
B. Jenis dan Sumber Data Penelitian	148
C. Teknik Pengumpulan Data	151
D. Teknik Analisis Data	152
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	154
A. Deskripsi Data Keterlibatan Aktor Swasta dalam Perkara Korupsi	154
1. Tren Keterlibatan Aktor Swasta dalam Statistik KPK 2004- Maret 2026	156
2. Komposisi Jenis Perkara Korupsi dalam Statistik KPK	158
3. Pengelompokan Aktor Berdasarkan Profesi/Jabatan dalam Statistik KPK	159
4. Pemetaan Kasus Korupsi Strategis yang Melibatkan Aktor Swasta	161
B. Hasil Penelitian	164
1. Konsep dan Karakteristik Suap (<i>Risywah</i>) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam	164
a. Risywah sebagai Penyimpangan dalam Muamalah	166
b. Karakteristik <i>Risywah</i> serta Perbedaannya dengan <i>Hadiyah, Ujrah</i> , dan Gratifikasi	171
c. Suap sebagai <i>Fasād fi al-mu'āmalāt</i>	179
d. Relevansi <i>Hifz al-māl</i>	181
2. Transformasi Hukum Pidana Indonesia dalam Penanggulangan Suap Sektor Swasta.....	184
a. Kesenjangan Pengaturan Suap Sektor Swasta dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam	184
b. Keterbatasan Jangkauan Hukum Pidana Positif	187
c. Kedudukan Instrumen Hukum Nasional dan Internasional	193
3. Kebijakan Transformasi dan Penguatan Regulasi Suap Sektor Swasta	199
a. Kriminalisasi Eksplisit Suap Sektor Swasta	200
b. Penguatan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (<i>Corporate Liability</i>)	203

c. Pembangunan Sistem Kepatuhan Antisuap (<i>Compliance System</i>)	206
d. Penguatan Pemulihan Aset (<i>Asset Recovery</i>)	208
e. Perlindungan Pelapor (<i>Whistleblower</i>) di Sektor Swasta ...	210
4. Dampak Hukum Penguatan Regulasi Suap Sektor Swasta	215
C. Pembahasan	222
1. Landasan Teoretis Pembahasan: Maqāṣid sebagai Pisau Analisis Utama	223
2. Batas Penerapan Pasal 603 KUHP dan Pasal 12B UU Tipikor terhadap Suap Sektor Swasta	231
3. Mekanisme Kualifikasi dari Ranah Muamalah dan Perdata menuju Ranah Pidana	236
4. Kritik dan Evaluasi atas Data Statistik dan Kasus Pendukung	246
5. Rasionalitas Pertanggungjawaban dan Pemidanaan Korporasi	256
6. Evaluasi Dampak terhadap Ḥifẓ al-māl dan Investasi	269
D. Penawaran Gagasan Baru	281
1. Transformasi Paradigma: Redesain Filosofis dari Orientasi Represif-Individual menuju Paradigma Etis-Sistemik	281
2. Model Transformasi Hukum Pidana Suap Sektor Swasta Berbasis Hukum Ekonomi Islam (HEI)	293
3. Elaborasi Lima Paket Kebijakan Strategis	300
BAB V PENUTUP	307
A. Simpulan	307
B. Implikasi dan Keterbatasan Penelitian	308
C. Saran	309
DAFTAR PUSTAKA	310

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1	Data Tindak Pidana Korupsi (TPK) Profesi/Jabatan	3
Tabel	1.2	Data Tindak Pidana Korupsi (TPK) Jenis Perkara	6
Tabel	1.3	Ikhtisar Tiga Level Teori Kerangka Pemikiran	26
Tabel	2.1	Penelitian Terdahulu	40
Tabel	2.2	Klasterisasi Tematik Penelitian Terdahulu	43
Tabel	2.3	Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Nasional	51
Tabel	2.4	Perkembangan Paradigma Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	65
Tabel	2.5	Klasifikasi Umum Tindak Pidana Korupsi dalam Kerangka Hukum Indonesia	66
Tabel	2.6	Pengaturan Tindak Pidana Suap dalam Kerangka Hukum Indonesia	70
Tabel	2.7	Karakteristik Suap Aktif dan Suap Pasif	75
Tabel	2.8	Perbedaan Karakteristik Suap Sektor Publik dan Suap Sektor Swasta	77
Tabel	2.9	Perbandingan Hukum Pidana Suap Sektor Swasta Lima Negara	123
Tabel	2.10	Operasionalisasi Prinsip Hukum Ekonomi Islam dalam Transformasi Hukum Pidana	139
Tabel	4.1	Pemetaan Kasus Korupsi Strategis yang Melibatkan Aktor Swasta dalam Relasi Ekonomi Publik-Privat di Indonesia	162
Tabel	4.2	Dimensi Fasād fi al-mu‘āmalāt dalam Suap Sektor Swasta	180
Tabel	4.3	Objek Perlindungan Hifz al-māl dalam Suap Sektor Swasta	183
Tabel	4.4	Operasionalisasi Maqāṣid al-Syarī‘ah dalam Analisis Suap Sektor Swasta	228
Tabel	4.5	Batas Penerapan Pasal 603 KUHP dan Pasal 12B UU Tipikor terhadap Suap Sektor Swasta	233
Tabel	4.6	Mekanisme Peralihan dari Ranah Muamalah dan Perdata menuju Ranah Pidana	240
Tabel	4.7	Evaluasi Daya Dukung dan Batas Inferensi Data statistik dan kasus pendukung	249
Tabel	4.8	Dasar Rasional Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Suap Sektor Swasta	261
Tabel	4.9	Matriks Pilihan Kebijakan Sanksi dan Tindakan terhadap Korporasi Pelaku Suap	265
Tabel	4.10	Matriks Indikator Turunan Dampak Hukum Penguatan Regulasi Suap Sektor Swasta	272

Tabel	4.11	Integrasi Lima Pilar Transformasi Paradigma dengan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah	289
Tabel	4.12	Konstruksi Model Transformasi Hukum Pidana Suap Sektor Swasta Berbasis Hukum Ekonomi Islam	298
Tabel	4.13	Lima Paket Kebijakan dalam Model Transformasi Hukum Pidana Suap Sektor Swasta	304



DAFTAR GAMBAR

Gambar	4.1	Tren Keterlibatan Aktor Berlatar Belakang Swasta dalam Statistik Penindakan KPK Tahun 2004–Maret 2026.....	156
Gambar	4.2	Komposisi Jenis Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Statistik Penindakan KPK Tahun 2004-2026	158
Gambar	4.3	Pengelompokan Aktor Berdasarkan Profesi/Jabatan dalam Statistik KPK Tahun 2004–Maret 2026.....	160
gambar	4.4	Model Transformasi Hukum Pidana Suap Sektor Swasta Berbasis Hukum Ekonomi Islam	296

